LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Lingkar Timur,
Manding, Trirenggo, Bantul

Website :https/dishub@bantulkab.go.id
Email: dishub@bantulkab.go.id

Telepon : (0274) 367321

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2023 ini dengan lancar tanpa hambatan apa pun.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2023 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama tahun 2023, di samping menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan ini. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Keuangan di tahun – tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh semua pihak serta dapat mendukung berbagai unsur dalam rangka pengambilan keputusan.

Bantul, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M

NIP 197307211997031007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
HALAMAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iv
Bab I Pendahuluan……..... 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 6
2.1 Ekonomi Makro 6
2.2 Kebijakan Keuangan 17
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja 18
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 33
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 33
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan 50
Bab IV Kebijakan Akuntansi 57
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan ……..... 64
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan 65
Bab VII Penutup 70
NERACA
LRA
LO
LPE
LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦼꦂꦲꦸꦧꦸꦔꦤ꧀
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: http/dishub@bantulkab.go.id, Email: dishub@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL

SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
NIP 197307211997031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bantul, salah satunya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Untuk itu di akhir tahun anggaran Bupati meminta Kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakannya.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tetapi berupa Laporan Keuangan.

Selama 1 (satu) tahun anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Neraca selaku Pengguna Barang, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ini adalah :

1. Menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama satu periode laporan.

2. Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan :
    a. Akuntabilitas

       Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
    b. Manajemen

       Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.
    c. Transparansi

       Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.
    d. Keseimbangan Antar Generasi

       Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang

akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam hal ini adalah :
   - pihak – pihak kepada siapa pemerintah bertanggung jawab
   - wakil rakyat dan lembaga pengawas
   - manajemen dan aparat pemerintah
   - pihak yang memberi/berperan dalam proses pemberian bantuan
   - pihak lain yang berkepentingan

   dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.
8. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b. Undang- undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang- undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang- undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
e. Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloalaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Bantul;

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
n. Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan TA 2023

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

EKONOMI MAKRO

2.1. Ekonomi Makro

Dari tahun ke tahun secara umum kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator, yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas pendukung seperti prasarana jalan beserta kelengkapan keselamatan lalu lintasnya.

Kondisi jalan – jalan di Kabupaten Bantul secara bertahap mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari kondisi jalan yang ada mayoritas sudah dalam kondisi mantap, namun fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas yang tersedia kiranya masih perlu mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah Bantul menurut informasi dari Polres Bantul masih cukup tinggi, meskipun mayoritas kasus terjadi karena faktor manusia.

Secara ideal peningkatan jalan seyogyanya diikuti dengan fasilitas lalu lintas yang memadai untuk mendukung keselamatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas seperti LPJU, rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan, halte dan sebagainya. Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas tersebut setiap tahun masih terbatas sehingga dari sisi kuantitas dan kualitas prasarana belum memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,

disusunlah perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Renstra – SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul) tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2021 berpedoman pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2021.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan : Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas
2. Sasaran : Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaen Bantul Tahun 2023:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Peningkatan keselamatan transportasi	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Adiministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Bebrbaisi Elektronik pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2. Pengadaan, Pemasangan,

			Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kebijakan prioritas program pembangunan bidang perhubungan untuk tahun 2023 sesuai Renja 2023 adalah :

Rencana program kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2022, rencana program kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2023 menggunakan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Apabila dilihat dari sisi anggaran, di tahun 2023 mengalami peningkatan anggaran. Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta alokasi

Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Murni	Perubahan	Tambah/Kurang
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		500.000.000	500.000.000	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	0
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.124.000	78.124.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.144.740.642	5.726.740.642	(4.180.000.000)
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.560.000	103.560.000	0
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	20.000..0000	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Monitoring, Evaliasi dan penilaian kinerja pegawai	30.537.298	25.537.298	(5.000.000)
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123.687.500	123.687.500	0

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.627.840	7.627.840	0
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.545.225	46.545.225	3.000.000
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.049.500	19.854.500	4.805.000
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.642.000	276.473.005	204.831.005
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	0
		6. Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	0
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.792.000	124.792.000	1.000.000
		8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	0
		9. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	32.348.000	29.288.000	(3.060.000)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.694.000	77.694.000	0
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	44.400.000	6.000.000
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.790.100	90.271.704	2.481.604
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.211.500	404.305.355	7.093.855

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.341.600	112.907.340	6.565.740
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.422.500	187.422.500	0
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.115.451	105.128.107	(23.987.344)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.561.730.000	19.182.880.000	4.621.150.000\
		2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.241.721.800	1.279.221.000	37.500.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	906.649.289	906.649.289	0

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	80.396.000	80.396.000	0
		2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	336.096.500	282.946.500	(53.150.000)
		3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.327.500	5.327.500	0
		4. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	25.650.000	25.650.000	0
		5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	237.200.000	290.350.000	53.150.000
		6. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.670.000	8.670.000	0
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	257.294.000	308.544.000	51.250.000
		2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.068.256.000	1.272.556.000	204.300.000
		3. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan	595.000.000	588.180.000	(6.820.000)

		Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	567.018.000	573.518.000	6.500.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	225.356.000	225.356.000	0
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	614.758.864	557.758.864	(57.000.000)
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	10.000.000	0
JUMLAH			**29.099.153.169**	**33.741.762.969**	

Perbandingan program kegiatan dan anggaran antara tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Program	2	3
Kegiatan	13	14
Subkegiatan	32	38
Anggaran Murni	21.040.271.569	29.099.153.169
Anggaran Perubahan	28.201.771.569	33.741.762.969

2.2. Kebijakan Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak. Sebagai dukungan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan dana (anggaran) dan barang/aset sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Untuk dapat melaksanakan tupoksi tersebut secara lancar dibutuhkan kebijakan pengelolaan dana (anggaran) yang telah dialokasikan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada dasarnya sama dengan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain :

1. Pengelolaan keuangan yang mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan, antara lain :
    a. Tertib, efektif, efisien, ekonomis
    b. Taat pada peraturan perundangan yang berlaku
    c. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan

2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
3. Semua transaksi keuangan baik penerimaan daerah maupun pengeluaran dicatat, dibukukan, dilaporkan serta dilaksanakan melalui kas daerah.

Untuk tahun 2023 kebijakan keuangan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat dilihat dari alokasi anggaran per program kegiatan yang telah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas telah ditetapkan pada saat penyusunan awal program, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Penetapan indikator kinerja ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengukuran kinerja. Terdapat beberapa indikator kinerja yang digunakan yaitu indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefits), indikator dampak (impacts).

Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja ini bersifat :

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif
3. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
4. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
5. Dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

Di samping itu ada beberapa karakteristik indikator kinerja yang baik antara lain :

1. Terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil
2. Terbatas pada hal – hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan
3. Terpusat pada hal – hal yang perlu mendapat prioritas
4. Terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperhatikan hasil.

Selain penetapan indikator kinerja, pada awal program ditetapkan pula pengukuran kinerja untuk mengetahui efektifitas kinerja yang dihasilkan. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi kinerja. Tahapan ini dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan didasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilihat dari penyerapan anggaran terhadap kegiatan yang diselesaikan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2023, maka diperoleh hasil **sebesar 98,28%.** Untuk jumlah nilai capaian kebijaksanaan, yang dalam skala pengukuran kinerja termasuk dalam kelompok **sangat berhasil**.

Secara umum pada tahun 2023 program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun demikian dari sisi anggaran secara keseluruhan masih terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 579.582.961,- (Lima Ratus Tujuh puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Adapun target pencapaian kinerja data laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Target Pencapaian Kinerja Data Laporan Penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2023

No	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran		Realisasi Kegiatan (Out Put)		Capaian Hasil (Out Come)	Ket
			Anggaran	Realisasi				
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	500.000.000	495.755.000	Dokumen Perencanaan dan Pengawasan	4 Dokumen	Persentase pemanfaat an ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang - undangan	**99,15**
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2 Dokumen	Persentase pemanfaat an ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang - undangan	

					LPJU	10 Unit	Persentase pemanfaat an ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang - undangan	
					Rambu Lalu Lintas, Papan Himbauan Keselamatan Lalu Lintas, RPPJ	86 Unit	Persentase pemanfaat an ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang - undangan	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000	16.850.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Capaian Kinerja Perencana an dan Evaluasi Perangkat Daerah	**99,12**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.124.000	78.124.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Capaian Kinerja Perencana an dan Evaluasi Perangkat Daerah	**100,00**

3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.726.740.642	5.598.660.775	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**97,76**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.560.000	99.310.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**95,90**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000	20.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	5 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	**100,00**
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.537.298	25.532.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**99,98**

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123.687.500	122.612.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**99,13**
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.627.840	7.614.000	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Capaian Kinerj a Pengelolaa n Administr asi Umum	**99,82**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.545.225	46.020.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	**98,87**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.854.500	17.949.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	**90,40**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	276.473.005	274.437.250	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	**99,26**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.362.250	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	**98,43**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.950.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	**99,50**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.792.000	124.667.640	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186 Laporan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	**99,90**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum	**100,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	29.288.000	28.562.500	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administrasi Umum	**97,52**
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.694.000	77.694.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	**100,00**

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	43.199.999	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	**97,30**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.271.704	89.618.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	**99,28**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.305.355	401.735.109	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	**99,36**
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.907.340	112.807.804	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	**99,91**

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.422.500	187.106.433	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	**99,83**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.128.107	104.525.172	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	**99,43**
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.182.880.000	18.832.909.200	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1393 Unit	Persentase ketersediaan perlengka pan jalan yang memadai	**98,18**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.279.221.800	1.274.789.850	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2932 Unit	Persentase ketersedia an perlengka pan jalan yang memadai	**99,65**

9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	906.649.289	873.737.296	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Persentase Tersediany a Fasilitas Penyeleng garaan Terminal Penumpan g Angkutan Jalan Tipe- C	**96,37**
10	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	80.396.000	72.130.000	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1200 Unit	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksana kan uji kendaraan bermotor	**89,72**
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	282.946.500	272.476.500	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksana kan uji kendaraan bermotor	**96,30**
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.327.500	5.327.500	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksana kan uji kendaraan bermotor	**100,00**

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	25.650.000	25.403.000	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksana kan uji kendaraan bermotor	**99,04**
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	290.350.000	285.255.780	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksana kan uji kendaraan bermotor	**98,25**
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.670.000	8.670.000	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksana kan uji kendaraan bermotor	**100,00**
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	308.544.000	305.573.200	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Persentase pelaksanaan manajeme n dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	**99,04**

	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.272.556.000	1.265.742.050	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	325 Unit	Persentase pelaksanaan manajeme n dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	**99,46**
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	588.180.000	584.729.800	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Persentase pelaksanaan manajeme n dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	**99,41**
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	573.518.000	573.518.000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Persentase pelaksanaan manajeme n dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	**100,00**

12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	225.356.000	219.905.600	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	**97,58**
13	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	557.758.864	556.965.800	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul	**99,86**

14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	9.952.500	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	Persentase pemanfaat an ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang - undangan	**99,53**
Jumlah			**33.741.762.969**	**33.162.180.008**				**98,28%**

Mengetahui
Pengguna Anggaran

SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
NIP 197307211997031007

Bantul, 31 Desember 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SRI MULYANTI, S.S.,M.Acc
NIP 197309121998032010

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas

Secara umum ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat disampaikan sebagai berikut :

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegaitan dan 1 (satu) subkegiatan. Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah) dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 495.755.000,- atau sebesar 99,15 %. Samapai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – outcome dapat tercapai.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 7.643.759.016,-(Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Belas Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 7.499.338.932,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan

Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) atau sebesar 98,11%.

Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditujukan untuk kegiatan sosialisasi program kegiatan pada renstra Dinas Perhubungan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 16.850.000,- (Enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 99,12%.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ditujukan untuk pembayaran honorarium tenaga pembantu pengadiminstrasi keuangan dan aset, serta uang transport jasa harian lepas untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja keuangan dan aset. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 78.124.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 78.124.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atau 100%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga sub kegiatan) yang terdiri dari:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji PNS serta tunjangan kinerja PNS.Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.726.740.642,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. 5.598.660.775,- (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 97,76%.

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran honor PPK PPTK, bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang guna untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 103.560.000,- (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp 103.560.000,- (Seratus tiga juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 100%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ditujukan untuk Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka penyusunan dokumen laporan kegiatan dinas antara lain : RKT, PPS, PKK, Laporan Triwulan, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan LAKIP, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan.
Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, semua laporan tersusun sesuai rencana. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau 100 %.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yang terdiri dari:
Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan makan minum rapat, fotocopy dan sewa Gedung. Anggaran yang dialokasikan Rp. 25.537.298,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh

Delapan Rupiah) dan terealisasi Rp. 25.532.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) atau 99,98%.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bidang perhubungan kaitannya dengan kewenangan teknis skala nasional yaitu peran serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) skala nasional yang diadakan oleh Kementrian Perhubungan serta rapat koordinasi teknis yang bersifat nasional, dan bimbingan teknis membangun kerja sama tim, serta pengiriman diklat perhubungan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 123.687.500,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.122.612.500,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99.13%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 9 (Sembilan) sub kegiatan yang meliputi:

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ditukuan untuk pengadaan komponen instalasi listrik (Fitting, Kabel, Lampu LED, Lampu TL, Stop kontak).Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.627.840,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tuju Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.614.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) atau 99,82%.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Rak Arsip, AC, Kipas Angin, Personal Computer dan Scanner). Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 46.545.225,- (Empat Puluh Enam

Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebsar Rp. 46.020.000,- (Empat Puluh enam Juta Dua Puluh RIbu Rupiah) atau 98.87%.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ditujukan untuk pembelian bahan peralatan kebersihan serta tabung gas elpigi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 19.854.500,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 17.949.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Rupiah) atau 90,40%.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ditujukan untuk penggandaan dokumen, Amplop Berkop Dinas, Bend.26, Cetak Banner, Stiker Label Aset, dan Publikasi Ke Media. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 276.473.005,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta EMpat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 274.437.250,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima puluh Rupiah) atau 99,26%.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ditujukan untuk surat kabar yang dialokasikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau 100%.
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu digunakan untuk makan minum jamuan tamu yang dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan terealisasikan sebesar Rp. 9.950.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 99,50 %.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordiasi dan Konsultasi SKPD ditukukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam

daerah dan luar daerah, serta jamuan makan minum tamu. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 124.792.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 124.667.640,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus EMpat Puluh Rupiah) atau 99,90%.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang meliputi:

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditujukan untuk pembelian materai dan benda pos, serta pembayaran honorarium tenaga administrasi persuratan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 77.694.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 77.694.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditujukan untuk pembayaran rekening listrik dan telepon 12 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 44.400.000,- (Empat Puluh Empat Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 43.199.999,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 97.30%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran, Servis dan Upgrade Komputer, Pemeliharaan CCTV, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Fax, Pemeliharaan Mesin Foto Copy, Pemeliharan Genset, Pemeliharan Printer, Pemeliharaan Rak Arsip, Karangan Bunga, alat tulis kantor, dan Pembelian Mebel Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 90.271.704,- (Sembilan Puluh Juta Dua

Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 89.618.500,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima ratus Rupiah) atau 99,28%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ditujukan untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium tenaga keamanan, pembayaran premi asuransi untuk tenaga non ASN, Pakaian Dinas Lapangan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 404.305.355,- (Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 401.735.109,- (Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Rupiah) atau 99,36%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua sub kegiatan) yaitu:

Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang ditujukan untuk bahan bakar minyak, pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan dan suku cadang yang dialokasikan sebesar Rp. 112.907.340,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 112.807.804,- (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapa Ratus Empat Rupiah) atau 99,91%.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang ditujukan untuk Bahan Bakar Minyak, jasa servis bus, KIR kendaraan, Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 187.422.500,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 187.106.433,- (Seratus Delapan

Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 99,83%.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditujukan untuk Pemeliharaan Gedung Bangunan Plafon Ruang Loby, Rehapbilitasi lantai 2 dan rehabilisai ruang arsip. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 105.128.107,- (Seratus Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Rupiah) dan terealisasi Rp. 104.525.172,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 99,43%

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini terdiri 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan

Kebijakan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai visi dan misi dinas. Anggaran yang dialokasikan atau dipergunakan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 25.598.003.953,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 25.167.086.076,- (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 98.32 %. Sampai dengan akhir tahun semua kegiatan dalam program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja atau target output – out come dapat tercapai.

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan jalan yang memadai. Tujuan kegiatan ini adalah pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan

kabupaten, dan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. Indikator kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai dengan target 18,19% terealisasi 13,92%.

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 15,803,451,800,- terealisasi Rp. 15,760,520,800,- atau 99,73%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

   Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 14,561,730,000,- terealisasi Rp. 14,535,331,000,- atau 99,82%.

   Untuk realisasi secara fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,82%.

   Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berupa Lampu Penerangan Jalan dan Cermin Tikungan.

   Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 1,241,721,800,- terealisasi Rp. 1,225,189,800,- atau 99,57%. Untuk realisasi secara fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,67%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pemeliharaan perlengkapan jalan Lampu Penerangan Jalan. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara.

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) bertujuan tersediaanya simpul

tansportasi yang memadai guna untuk melauyani angkutan orang dalam trayek yang lebih baik. Kegaitan ini meliputi pemeliharaan halte bus yang nyaman bagi pengguna angkutan, rehabilitasi pembangunan gedung terminal, Pengerasan jalan di area terminal, pemeliharaan kamar mandi/wc terminal, pembuatan halte taman di termina, makan minum rapat, ATL dan pakaian teknik serta sepatu boot.

Dinas Perhubungan kab. Bantul memiliki 3 Terminal yang masih beroperasi, yaitu :

1. Terminal Palbapang
2. Terminal Imogiri dan
3. Terminal Parangtritis

Fasilitas publik ini seiring dengan perkembangan kondiisi, sangat mmbutuhkan fasilitasi pemeliharaan dan rehabilitasi atas sarana dan prasarananya. Di Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kab. Bantul menganggarkan fasilitasi pemeliharaan dan rehabilitasi untuk terminal type C di Bantul sebesar Rp. 906.649.289,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 873.737.296,00 atau sebesar 96,37%.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Maksud dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pelayanan Uji Berkala Kendraan Bermotor untuk kendaraan Wajib Uji Di Kabupaten Bantul sesuai denga UU no. 22 Tahun 2009. Adapun tujuan dari Pengujian berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan di jalan.
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan
- Memberikan pelayanan umum pada masyarakat.

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya sarana administrasi pendukung kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk penyediaan Kartu register kendaraan baru, Mutasi Masuk dan Numpang Uji masuk sebantak, Stiker gesek untuk registrasi nomor Rangka dan nomor Mesin Kendaraan Wajib Uji sebanya dan Honorarium jasa tenaga non ASN. Indikator keluaran Sub Kegiatan ini adalah jumlah kendaraan wajib uji berkala yang terdaftar. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 80.396.000,- (Delapan Puluh Juta TIga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 72.130.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 89,72%

Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Bukti Hasil Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator keluaran Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Kendaraan bermotor. Adapaun realisasi bentuk kegiatan ini adalah belanja kartu Smart Card, Bukti Lulus Uji Kendaraan Wajib Uji Berjalan yang terdaftar.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 282.946.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 272.476.500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 96,20%.

Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Adapun Bentuk Kegiatan ini adalah Sosialisasi dengan Peraturan Tentang pengujian Kendaraan Bermotor kepada pengusaha angkutan dan warga masyarakat pengguna layanan uji kendaraan bermotor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas adalah sebesar Rp. 5.327.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh RIbu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.327.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh RIbu Rupiah) atau sebesar 100%.

Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Adapun Bentuk Kegiatannya adalah Pendataan Potensi jumlah kendaraan wajib uji di kab. Bantul Indikator keluaran Sub Bagian ini adalah Jumlah Kendaraan yang teridentifikasi dan potensi jumlah kendaraan bermotor Wajib Uji

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 25.650.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.403.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 99,04 %.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Adapun bentuk kegiatan pada sub kegiatan ini adalah Pemeliharaan Alat Uji kendaraan bermotor sejumlah 5 unit serta Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor. Hal ini sangat diperlukan mengingat jumlah wajib uji di Kabupaten Bantul yang cukup banyak sehingga akurasi alat uji perlu dipertahankan. Indikator Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 290.350.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp 285.255.780,-(

Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 98,2%.

Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Adapun bentuk kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi Intern maupun Rapat dengan instansi terkait mengenai Permasalahan Pengujian Kendaraan Bermotor. Indikator Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 8.670.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.670.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 100 %.

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan.

Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 308.544.000,- (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 305.573.200,- (Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99,04%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: kegiatan Analisis DampakLAluLintas (ANDALALIN), survey lalu lintas, kegiatan Naskah Akademik Penyusunan Raperda Parkir, Kajian Apill Simpang Tiga Kantor Pos Pleret dan Kajian Sistem Pengendalian Lalu Lintas Di Ruas Jalan Jenderal Sudirman. Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan pada tahun 2023 sebanyak 6 (enam) standar teknis dan 1 (satu) kajian manajemen rekayasa lalu lintas.

Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas berupa: pemeliharaan sparepart apill dan rambu flashing dan pengadaan komponen rambu – rambu. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas. Perbaikan APILL dilaksanakan di 19 titik APILL di wilayah Kabupaten Bantul.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.272.556.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.265.742.050,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah) atau 99,54%.

Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas sebanyak 80 (delapan puluh) kali, *safety riding* sebanyak 2 (dua) kali, kesamaptaan sebanyak 6 kali dan sosialisasi pelajar sebanyak 4 (empat) kali. Sosialisasi pelajar dilaksanakan di SMK N 1Pajangan , SMA N 1 Pleret, SMA N 1 Jetis, SMK 1 Dlingo dengan sasaran siswa 350 siswa. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 588.180.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terealisasi Rp. 584.729.800,- (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan ratus Rupiah) atau 99,41%. Untuk realisasi secara fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,41%.

Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/kota.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Kegiatan Pengamanan dan wasdal parkir. Wasdal parkir dilaksanakan untuk parkir Tepi jalan umum dan Parkir Khusus. Adapun jumlah parkir tepi jalan umum sebanyak 122 lokasi dan Jumlah parkir khusus sebanyak 51 lokasi. Kegiatan PPNS pada Tahun 2023 sebanyak 6 kali, Wasdal parkir dilaksanakan sebanyak 144 kali dan kegiatan pam insidentil sebanyak 85 kali. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan.

pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 573.518.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp. 573.518.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) atau 100%. Untuk realisasi secara fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Target Pendapatan Daerah parkir adalah :

a. Parkir Tepi Jalan Umum Target Rp. 278.960.000,-. Realisasi.Rp. 265.455.000,- tercapai (95%).
b. Parkir Khusus Target Rp. 250.000.000,-. Realisasi Rp. 267.995.000,- , tercapai (107,80%).

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**.**

Maksud Dari Sub Kegiatan Ini Adalah Tersedianya Simpul Transportasi Yang Memadai Guna Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek Yang Lebih Baik di Jalan Kabupate/Kota. Tujuan Dari

Kegiatan Ini Adalah Dokumen Kontrak Pembantu Pelakasnaan Kegiatan.

Dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini:

1. Dokumen Kajian Analia Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada terminal Palbapang;
2. Dokumen Kajian Perencanaan Bus Sekolah;
3. Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum.

Hasil dari survey tersebut adalah tersedianya data angkutan orang.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 225.356.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta TIga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 219.905.000,-(Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) atau 97,58%.

Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud Sub Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan. Tujuan Kegiatan Ini Adalah Tersedianya Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Memfasilitasi Jasa TenagaPembantu Pengumpul Data Bidang Angkutan;
b. Penyelenggaraan Bantul Creative Expo Tahun 2023;
c. Kegiatan Sosialisasi Keselematan Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan sebanyak 43 Kali.

Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 557.758.864,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh

Empat Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 556.965.800 ,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam PuluhLima Ribu Delapan ratus Rupiah) atau 98,86%.

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Maksud Sub Kegiatan Ini Adalah Kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk para pengelola kios di terminal Palbapang dan Imogiri yang terdaftar sejumlah 65 Orang dan dilaksanakan selama 5 Kali dalam setahun. Kegiatan ini urgen dilaksanakan, mengingat para pengelola kios di 2 terminal ini, menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Hasil dari kegiatan ini meliputi Laporan Fasilitas Perijinan 1 dokumen.

Adapun anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 9.952.500 ,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,50%.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk Dinas Perhubungan, sesuai Dokumen DPPA – SKPD tahun 2023 sebesar **Rp. 33.741.762.969,-** (Tiga Puluh Tiga milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Rtus Enam Puluh Sembilan Rupiah), secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 33.162.180.008,-** (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 579.582.961,-** (Lima Ratus

Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus DelapanPuluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang masih sering dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan SDM. Kualitas SDM di semua bidang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas yang semakin kompleks teratasi dan selesai tepat pada waktunya, sedangkan dalam hal kuantitas masih sangat diperlukan mengingat volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul semakin banyak. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih diperlukan tenaga / personil dengan spesifikasi pendidikan SMA IPA, STM Mesin / Listrik, Akademi Lalu Lintas (D3), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (D4), D2 Pengujian Kendaraan Bermotor, PPNS Bidang Perhubungan.
2. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga masih sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional seperti mobil patroli tertutup, sepeda motor, sarana komunikasi, dan perlengkapan keselamatan, menyebabkan kurangnya optimalisasi kinerja dinas.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan wajib di bidang perhubungan.

Sedangkan tugas pokok dan uraian tugas secara dirinci diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sementara landasan operasional lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas tugas teknis antara lain Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan urusan Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan, SK Dirjen dan sebagainya.

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan entitas akuntansi adalah SKPD sedangkan yang disebut entitas pelaporan adalah SKPKD. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola.

Sementara itu dalam UU nomor 1 tahun 2004 dijelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan dengan entitas pelaporan.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang terdiri dari pendapatan dan belanja serta realisasinya. Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat selisih antara anggaran dan realisasinya atau melihat rasio – rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan dsb.

2. Laporan Operasional (LO)

   Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   Merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca

   Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada akhir tahun anggaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.

5. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

   Laporan ini memberikan informasi mengenai berbagai hal yang

tidak terbaca dari LRA, LO, LPE, dan Neraca. Laporan ini berisi penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan ini juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode dan dasar penentuan dan penyajian angka – angka LRA dan Neraca di samping juga menjelaskan berbagai faktor,

asumsi dan kondisi yang mempengaruhi angka – angka dalam Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : basis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Basis pengukuran atas penyusunan pos – pos laporan keuangan adalah :

1. Kas

   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa sisa UP / TU yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas bendahara tersebut (saldo

pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke kas daerah.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntasi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventary taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan / atau pengurangannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara :

a. biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
b. harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya. Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan atau harga perolehan yang diestimasikan.

4.Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI).

EDL : selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek

EDI : kekayaan yang tertanam dalam investasi jangka panjang dan aset lainnya dikurangi jumlah kewajiban jangka panjang.

5. Pendapatan

   Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

6. Belanja

   Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi beban daerah. Pengakuan biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi kewenangannya dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca selaku Pengguna Barang serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun demikian penerapan kebijakan akuntansi yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya didasarkan pada biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Pos Pelaporan Keuangan

1. **Pendapatan**

   Di samping mengelola belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul juga melaksanakan tugas sebagai dinas penghasil PAD. Beberapa retribusi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu dan Lain lain pendapatan yang sah. Adapun realisasi yang diperoleh dari masing – masing jenis retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

   Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

   Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lalu lintas yang ada di sekitarnya.

   Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pertama – tama dimaksudkan sebagai fasilitas pendukung untuk menjamin tercapainya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, selain itu juga telah membuka peluang bagi warga masyarakat untuk bergerak dalam perekonomian usaha jasa.

   Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi regulasi bagi penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum akan menimbulkan beban biaya penyediaan jasa penyelenggaraan parkir yang semakin meningkat sehingga perlu diupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dipungut kepada wajib retribusi yang menyelenggarakan parkir dengan menggunakan badan jalan. Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pemungutan retribusi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun target pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tahun 2023 sebesar Rp. 278.960.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 265.455.000,- (Dua Ratus Enam puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) atau sebesar 95%.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan secara bertahap untuk setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus dengan maksud untuk lebih menjamin terpenuhinya persayaratan teknis dan laik jalan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menjamin keselamatan para pengguna jalan.

Di Kabupaten Bantul, teknis penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Adapun target pendapatan dari Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tahun 2023 sebesar Rp. 1.278.511.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 910.708.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 71,23%.

Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

Target Retribusi ini pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan dapat terealisasi sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 116%.

Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Retribusi Terminal Untuk menjamin keamanan, kelancaran, ketertiban, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan terminal diperlukan partisipasi masyarakat pengguna jasa terminal. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi terminal.

Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.

Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
sedangkan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Perbup Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal.

Adapun target pendapatan retribusi terminal pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 187.173.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
Sampai dengan akhir Desember 2023 dapat terealisasi sebesar Rp. 231.057.700,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau sebesar 123%.

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang semakin kompleks akan menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah terpenuhinya ruang parkir yang berada di tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan publik.

Penyediaan tempat khusus parkir merupakan pelayanan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah berupa tanah atau bangunan. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan ini maka pihak swasta dapat dilibatkan dalam pengelolaannya dengan menganut prinsip – prinsip komersial.

Dalam rangka menjalankan fungsi regulasi dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang dipakai tempat khusus parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, ditempuh dengan meningkatkan peran partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir beserta retribusinya, dalam hal ini retribusi tempat khusus parkir.
Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Adapun target pendapatan dari retribusi parkir Khusus untuk tahun 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. Rp. 267.995.000,- (Dua ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 107,0 %.

1.3. **Lain – Lain Pendapatan Yang Sah**

Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini adalah pendapatan dari denda retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pendapatan yang dimaksud disini adalah denda keterlambatan uji kendaraan bermotor. Dasar pemungutannya adalah Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, BAB XV, Pasal 82 yaitu sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar. Pada tahun 2023 target untuk denda retribusi Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah), sampai dengan akhir tahun 2023 masuk denda sebesar Rp. 8.863.740,- (Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 118%.

Berikut disajikan secara ringkas mengenai target dan realisasi pendapatan dari masing – masing jenis retribusi di atas.

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000	265.455.000	95
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.278.511.500	910.708.000	71
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000	5.800.000	116
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	187.173.000	231.057.700	123
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000	267.995.000	107

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000	8.863.740	118
Jumlah	2.007.144.500	1.689.879.440	84

2. Belanja

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 33.741.762.969,-** (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 33.162.180.008** (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Dua Jua Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Belanja Operasi

Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp. 14.010.528.984,- (Empat Belas Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.181.165.996,- (Tiga Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	5.855.875.642	5.598.660.775
2	Belanja Barang dan Jasa	8.699.271.813	8.608.897.753
Jumlah		14.555.147.455	14.207.558.528

2.2 Belanja Modal

Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 19.186.615.514,- (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).

Sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 18.830.661.480,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.875.586.514	18.523.153.200
2	Belanja Peralatan dan Mesin	311.029.000	307.508.280
Jumlah		19.186.615.514	18.830.661.480

Dari keseluruhan belanja modal tersebut menghasilkan aset tetap sebesar Rp. 18.830.661.480,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta EnamRatus Enam Puluh Satu RIbu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Peralatan dan Mesin : Rp. 615.186.496,-
b. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 18.523.153.200,-

3. Aset

Jumlah keseluruhan aset baik aset lancar maupun aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Persediaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 baik Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas di Bendahara Penerimaan **tidak ada sisa kas.**

Sedangkan untuk persediaan terdapat sisa persediaan sebesar Rp. 411.497.255 (Empat Ratus Sebelas Juta Empat ratus Sembilan Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

b. Aset Tetap

Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat tambahan aset tetap dari hasil dropping dari PPKD kabupaten Bantul. Aset tetap yang berasal dari hibah dari PPKD Kabupaten Bantul (ESDM) sebesar Rp. 1.954.942.020,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah) yaitul terdiri dari :

1. LPJU Solar Cell dari ESDM Rp 1.954.942.020

Jumlah Aset yang dihapus tahun 2023 sebesar Rp 334.587.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Limaratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari:

1. Peralatan Mesin Rp 334.587.500

Total Aset tahun 2023 sebesar Rp. 195.692.418.822,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empar Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) terdiri dari :

1. Tanah	Rp	4.025.200.000,-
2. Peralatan dan Mesin	Rp.	27.412.166.849-
3. Gedung dan Bangunan	Rp.	13.313.765.620,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	147.103.141,303,-
5. Aset Tetap lainnya	Rp.	2.816.767.252,-
6. Aset Lainnya (ATB)	Rp.	1.021.377.800,-

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. DinasSekretariat
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Lalu Lintas
5. Bidang Perlengkapan Jalan
6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sarana dan Pendukung Kegiatan Administrasi dan Operasional

Pendukung Kegiatan Administrasi

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 45 (empat puluh Lima) orang

Menurut kualifikasi pendidikan :

SD : 1
SLTA/ SMK : 20
D3 : 9
S1 : 8
S2 : 7

Sedangkan menurut golongan adalah :

Golongan I : 1
Golongan II : 18
Golongan III : 20
Golongan IV : 6

6.3 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Untuk melaksanakan kegiatan dinas utamanya kegiatan operasional dan untuk mencapai target kinerja yang optimal dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mobil operasional tertutup	:	6
Mobil operasional terbuka	:	4
Sepeda motor operasional	:	15
Sepeda motor patwal	:	8
Bus	:	3
Truk LPJU	:	2
Kamera	:	9
LCD	:	3
Laptop	:	29
Komputer	:	29
HT	:	50
Sepeda	:	4
Printer	:	44
AC	:	29
Genset	:	1
Kipas Angin	:	13
GPS	:	2
Kulkas	:	1
Mesin Fax	:	2
Mesin Fotocopy	:	1
Mesin ketik	:	2
Mesin las	:	1
Felt Bed	:	10
Alat Uji Emisi Bensin	:	2
Alat Uji Emisi Solar	:	2
Alat Timbang Portable	:	1
Deselometer	:	1
Megaphone	:	2

Speaker Aktif	:	2
Vacum Cleaner	:	1
Laser Distance Meter	:	1
Tenda Gazebo	:	10
Kursi Tamu	:	11
Kursi Putar Staf	:	50
Kursi Struktural Eselon III	:	3
Kursi Eselon IV	:	8
Kursi Pimpinan	:	1
Kursi Tunggu	:	8
Kursi Rapat	:	89
CCTV	:	2
Alat Pengangkat	:	1
Brake Tester	:	1
Kompressor	:	1
Dispenser	:	2
Rak Arsip	:	6
Tablet	:	1
Filling Cabinet	:	11
Finger Print	:	3
Televisi	:	3
Tabung APAR	:	4

6.4 Pencapaian Kinerja Non Keuangan

Beberapa pencapaian kinerja non keuangan yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul di tahun 2023 antara lain :

a. Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan daftar nominatif pegawai;
2. Penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan);

3. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai;
4. Pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai;
5. Pengusulan pensiun pegawai;
6. Pembuatan cuti pegawai;
7. Penyusunan Anjab, ABK, SKP.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan pengiriman diklat.

   Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas yang sangat penting karena bagaimana pun beratnya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan profesional akan menjadi terasa lebih ringan. Diklat yang diikuti tidak hanya diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya APBD tetapi juga diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan dengan biaya APBN.

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

   Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan adanya pelaksanaan administrasi persuratan dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu.

d. Penyusunan rencana program kegiatan untuk tahun 2024.

   Kegiatan ini berjalan lancar. Rencana dapat disusun tepat waktu baik untuk anggaran rutin maupun pendapatan. Rencana telah disetujui DPR untuk dilaksanakan tahun 2024.

e. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD tahun 2024.

   Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD tahun 2024 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA tahun 2024.

f. Wasdal penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.

   Kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir tahun 2023. Telah diadakan pertemuan / sambung rasa dengan petugas parkir di seluruh Kabupaten Bantul baik parkir tepi jalan umum maupun parkir di tempat khusus parkir, dan telah dibentuk paguyuban petugas parkir. Sampai dengan akhir tahun telah dilaksanakan kegiatan wasdal sebanyak 114 (Seratus Empat Puluh Empat) kali.

g. Pelayanan perijinan bidang perhubungan.

Kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti sampai dengan akhir tahun. Perijinan yang dilayani antara lain perijinan penyelenggaraan perparkiran yang sampai dengan akhir tahun telah dikeluarkan sebanyak 173 (seratus Tujuh puluh Tiga) ijin parkir terdiri dari 122 (seratus Dua Puluh Dua) ijin parkir tepi jalan umum dan 51 (lima puluh satu) ijin parkir khusus.

BAB VII
PENUTUP

Demikian secara keseluruhan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat kami sajikan. Tentunya dalam penyusunannya tidak lepas dari kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun - tahun berikutnya. Secara ringkas berikut kami sajikan perbandingan kondisi tahun 2022 dan 2023 sbb:

	2022	2023
Pagu anggaran	Murni : 21.040.271.569 Penambahan : 7.161.500.000 Jumlah : 28.201.771.569	Murni : 29.099.153.169 Penambahan : 4.642.609.800 Jumlah : 33.741.762.969
Rincian belanja	Operasi : 14.010.528.984 Modal : 14.191.242.585	Operasi : 14.555.147.455 Modal : 19.186.615.514
Komposisi program kegiatan dan peng gunaan anggaran	Program : 2 program Kegiatan : 13 kegiatan Sub Kegiatan : 32 sub kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang KLL, Bidang Angkutan	Program : 3 program Kegiatan : 14 kegiatan Sub Kegiatan : 38 sub kegiatan Pelaksana : Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Perlengkapan Jalan, Bidang Angkutan
Personil	PNS : 48 orang PHL : 73 orang	PNS : 46 orang PHL : 73 orang

Bantul, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M

NIP 197307211997031007

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SATKER : DINAS PERHUBUNGAN

SUB UNIT : UNIT INDUK

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
1	**ASET**				
11	**ASET LANCAR**				
111	**Kas dan Setara Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11106	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00	0,00	0,00	**0,00**
113	**Piutang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	169.290.500,00	130.450.500,00	38.840.000,00	**29,77**
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	(169.290.500,00)	(130.450.500,00)	(38.840.000,00)	**29,77**
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11305	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130501	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130502	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11306	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130601	Piutang Pendapatan Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1130602	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
114	**Belanja Dibayar Dimuka**	**16.281.250,00**	**18.188.750,00**	**(1.907.500,00)**	**(10,49)**
11401	Belanja Dibayar Dimuka	16.281.250,00	18.188.750,00	(1.907.500,00)	**(10,49)**
115	**Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11501	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
116	**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	**0,00**

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
117	**Piutang Lain-lain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11701	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	**0,00**
119	**Persediaan**	**411.497.255,00**	**546.068.594,00**	**(134.571.339,00)**	**(24,64)**
11901	Persediaan	411.497.255,00	546.068.594,00	(134.571.339,00)	**(24,64)**
	JUMLAH ASET LANCAR	**427.778.505,00**	**564.257.344,00**	**(136.478.839,00)**	**(24,19)**
13	**ASET TETAP**				
131	**Tanah**	**4.025.200.000,00**	**4.025.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
13101	Tanah	4.025.200.000,00	4.025.200.000,00	0,00	**0,00**
132	**Peralatan dan Mesin**	**27.013.167.848,83**	**26.412.409.568,82**	**600.758.280,01**	**2,27**
13201	Peralatan dan Mesin	27.013.167.848,83	26.412.409.568,82	600.758.280,01	**2,27**
133	**Gedung dan Bangunan**	**13.313.765.620,00**	**13.182.648.123,00**	**131.117.497,00**	**0,99**
13301	Gedung dan Bangunan	13.313.765.620,00	13.182.648.123,00	131.117.497,00	**0,99**
134	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**147.103.141.303,08**	**126.619.746.083,09**	**20.483.395.219,99**	**16,18**
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.103.141.303,08	126.619.746.083,09	20.483.395.219,99	**16,18**
135	**Aset Tetap Lainnya**	**2.816.767.252,32**	**2.816.395.002,32**	**372.250,00**	**0,01**
13501	Aset Tetap Lainnya	2.816.767.252,32	2.816.395.002,32	372.250,00	**0,01**
136	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	**0,00**
137	**Akumulasi Penyusutan**	**(51.741.117.758,26)**	**(45.562.956.172,84)**	**(6.178.161.585,42)**	**13,56**
13701	Akumulasi Penyusutan	(51.741.117.758,26)	(45.562.956.172,84)	(6.178.161.585,42)	**13,56**
	JUMLAH ASET TETAP	**142.530.924.265,97**	**127.493.442.604,39**	**15.037.481.661,58**	**11,79**
15	**ASET LAINNYA**				
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	**0,00**
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	**0,00**
153	**Aset Tak Berwujud**	**456.561.240,00**	**158.274.400,00**	**298.286.840,00**	**188,46**
15301	Aset Tak Berwujud	1.021.377.800,00	580.562.000,00	440.815.800,00	**75,93**
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(564.816.560,00)	(422.287.600,00)	(142.528.960,00)	**33,75**
154	**Aset Lain-lain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15401	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	**0,00**
155	**Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	JUMLAH ASET LAINNYA	**456.561.240,00**	**158.274.400,00**	**298.286.840,00**	**188,46**
	JUMLAH ASET	**143.415.264.010,97**	**128.215.974.348,39**	**15.199.289.662,58**	**11,85**
2	**KEWAJIBAN**				
21	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**				
211	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215	**Utang Belanja**	**3.695.853,00**	**3.516.731,00**	**179.122,00**	**5,09**
21501	Utang Belanja	3.695.853,00	3.516.731,00	179.122,00	**5,09**
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21602	Utang Uang Jaminan	0,00	0,00	0,00	**0,00**

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.695.853,00	3.516.731,00	179.122,00	5,09
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.695.853,00	3.516.731,00	179.122,00	5,09
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	143.411.568.157,97	128.212.457.617,39	15.199.110.540,58	11,85
	JUMLAH EKUITAS	143.411.568.157,97	128.212.457.617,39	15.199.110.540,58	11,85
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143.415.264.010,97	128.215.974.348,39	15.199.289.662,58	11,85

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Singgih Riyadi, SE., M.M

197307211997031007

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PER REKENING JENIS
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE : 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

SATKER : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT : UNIT INDUK

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.007.144.500,00**	**1.689.879.440,00**	**(317.265.060,00)**	**84,19**
4.1.02	Retribusi Daerah	1.999.644.500,00	1.681.015.700,00	(318.628.800,00)	84,07
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.500.000,00	8.863.740,00	1.363.740,00	118,18
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.007.144.500,00**	**1.689.879.440,00**	**(317.265.060,00)**	**84,19**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**14.555.147.455,00**	**14.331.518.528,00**	**(223.628.927,00)**	**98,46**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.855.875.642,00	5.722.620.775,00	(133.254.867,00)	97,72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.699.271.813,00	8.608.897.753,00	(90.374.060,00)	98,96
5.2	**BELANJA MODAL**	**19.186.615.514,00**	**18.830.661.480,00**	**(355.954.034,00)**	**98,14**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	311.029.000,00	307.508.280,00	(3.520.720,00)	98,87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.875.586.514,00	18.523.153.200,00	(352.433.314,00)	98,13
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**33.741.762.969,00**	**33.162.180.008,00**	**(579.582.961,00)**	**98,28**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(31.734.618.469,00)**	**(31.472.300.568,00)**	**262.317.901,00**	**99,17**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(31.734.618.469,00)**	**(31.472.300.568,00)**	**262.317.901,00**	**99,17**

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Singgih Riyadi, SE., M.M

NIP. 197307211997031007

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN OPERASIONAL

DINAS PERHUBUNGAN

UNIT INDUK

TAHUN ANGGARAN 2023

PERIODE : **01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023**

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.729.129.440,00
7.1.02	Retribusi Daerah - LO	1.720.265.700,00
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum - LO	1.208.318.000,00
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	297.610.000,00
7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	297.610.000,00
7.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	910.708.000,00
7.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	910.708.000,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha - LO	511.947.700,00
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	5.800.000,00
7.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor - LO	5.800.000,00
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal - LO	231.057.700,00
7.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	231.057.700,00
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	275.090.000,00
7.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	275.090.000,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah - LO	8.863.740,00
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	8.863.740,00
7.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO	8.863.740,00
7.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	8.863.740,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO	1.729.129.440,00
8	BEBAN DAERAH	
8.1	BEBAN OPERASI	21.004.446.650,72
8.1.01	Beban Pegawai	5.722.620.775,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.654.637,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.256.326.000,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.256.326.000,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	225.906.528,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	225.906.528,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	142.100.000,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	142.100.000,00
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	38.265.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	38.265.000,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	66.305.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	66.305.000,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	138.394.620,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	138.394.620,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	10.129.632,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	10.129.632,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	29.922,00

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	29.922,00
8.1.01.01.09	**Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**178.638.778,00**
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	178.638.778,00
8.1.01.01.10	**Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**4.639.759,00**
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.639.759,00
8.1.01.01.11	**Beban Iuran Jaminan Kematian ASN**	**13.919.398,00**
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	13.919.398,00
8.1.01.02	**Beban Tambahan Penghasilan ASN**	**2.524.006.138,00**
8.1.01.02.05	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**2.524.006.138,00**
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.524.006.138,00
8.1.01.03	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**123.960.000,00**
8.1.01.03.07	**Beban Honorarium**	**123.960.000,00**
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.310.000,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	24.650.000,00
8.1.02	**Beban Barang dan Jasa**	**8.608.897.753,00**
8.1.02.01	**Beban Barang**	**3.525.150.295,00**
8.1.02.01.01	**Beban Barang Pakai Habis**	**2.196.494.245,00**
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	101.691.295,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	193.055.250,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.010.000,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	660.000,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.920.000,00
8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	8.991.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	276.650.750,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	167.773.350,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.260.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	643.924.100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	83.311.000,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	1.250.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	117.810.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.950.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	387.837.500,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.500.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.000.000,00
8.1.02.01.01.0069	Beban Pakaian Teknik	38.500.000,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	55.000.000,00
8.1.02.01.02	**Beban Barang Tak Habis Pakai**	**1.328.656.050,00**
8.1.02.01.02.0004	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.328.656.050,00
8.1.02.02	**Beban Jasa**	**3.508.256.197,00**
8.1.02.02.01	**Beban Jasa Kantor**	**2.614.200.549,00**
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	187.650.000,00

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00
8.1.02.02.01.0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.221.301.500,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	500.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	223.182.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	599.168.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	49.596.000,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	99.192.000,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	49.250.000,00
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	10.000.000,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	136.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	108.082.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	7.199.999,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	36.000.000,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.362.250,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.180.800,00
8.1.02.02.02	**Beban Iuran Jaminan / Asuransi**	**91.553.109,00**
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	82.347.634,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.091.321,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.114.154,00
8.1.02.02.03	**Beban Sewa Tanah**	**35.678.739,00**
8.1.02.02.03.0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	35.678.739,00
8.1.02.02.04	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**	**59.080.000,00**
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.700.000,00
8.1.02.02.04.0128	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	14.130.000,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	16.750.000,00
8.1.02.02.04.0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	25.500.000,00
8.1.02.02.05	**Beban Sewa Gedung dan Bangunan**	**181.175.000,00**
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	8.500.000,00
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	172.675.000,00
8.1.02.02.08	**Beban Sewa Aset Tidak Berwujud**	**35.500.000,00**
8.1.02.02.08.0014	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan	20.650.000,00
8.1.02.02.08.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	14.850.000,00
8.1.02.02.09	**Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**	**490.068.800,00**
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	24.753.000,00
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	440.815.800,00
8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	24.500.000,00
8.1.02.02.12	**Beban Beasiswa Pendidikan PNS**	**1.000.000,00**
8.1.02.02.12.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	1.000.000,00
8.1.02.03	**Beban Pemeliharaan**	**1.247.273.621,00**
8.1.02.03.02	**Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**234.402.187,00**
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	88.678.187,00

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	145.724.000,00
8.1.02.03.03	**Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**344.856.356,00**
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	344.856.356,00
8.1.02.03.04	**Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**668.015.078,00**
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	230.041.073,00
8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	400.005,00
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	437.574.000,00
8.1.02.04	**Beban Perjalanan Dinas**	**328.217.640,00**
8.1.02.04.01	**Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah**	**328.217.640,00**
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	62.867.640,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	265.350.000,00
8.1.07	**Beban Penyisihan Piutang**	**38.840.000,00**
8.1.07.02	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**	**38.840.000,00**
8.1.07.02.01	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum**	**32.155.000,00**
8.1.07.02.01.0023	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum- Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	32.155.000,00
8.1.07.02.02	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha**	**6.685.000,00**
8.1.07.02.02.0026	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir	6.685.000,00
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**6.634.088.122,72**
8.1.08.01	**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**	**2.507.716.156,14**
8.1.08.01.02	**Beban Penyusutan Alat Angkutan**	**2.507.716.156,14**
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.507.716.156,14
8.1.08.02	**Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**	**266.619.062,40**
8.1.08.02.01	**Beban Penyusutan Bangunan Gedung**	**266.619.062,40**
8.1.08.02.01.0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	266.619.062,40
8.1.08.03	**Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**3.717.223.944,18**
8.1.08.03.04	**Beban Penyusutan Jaringan**	**3.717.223.944,18**
8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.717.223.944,18
8.1.08.06	**Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**	**142.528.960,00**
8.1.08.06.01	**Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**142.528.960,00**
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	142.528.960,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	**21.004.446.650,72**
	SURPLUS / DEFISIT LO	**(19.275.317.210,72)**

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Singgih Riyadi, SE., M.M

NIP. 197307211997031007

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SATKER : DINAS PERHUBUNGAN

SUB UNIT UNIT INDUK

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	128.212.457.617,39	114.432.751.140,59
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(19.275.317.210,72)	(16.439.873.539,89)
3	ASET/EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	31.471.890.568,00	25.702.955.934,36
31	R/K SKPD	0,00	25.702.955.934,36
32	R/K PPKD	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	3.002.537.183,30	4.516.624.082,33
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	3.002.537.183,30	4.516.624.082,33
	EKUITAS AKHIR	**143.411.568.157,97**	**128.212.457.617,39**

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Singgih Riyadi, SE., M.M

197307211997031007